

SKRIPSI

PERKAWINAN ANTAR WARGA NEGARA INDONESIA YANG DILAKSANAKAN DI LUAR NEGERI (KEABSAHAN DAN PENCATATANNYA)



Oleh :

SUGENG LESTARI

030115264

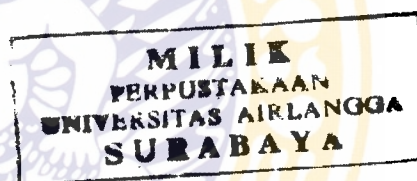
**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**



**PERKAWINAN ANTAR WARGA NEGARA
INDONESIA YANG DILAKSANAKAN DI LUAR
NEGERI (KEABSAHAN DAN PENCATATANNYA)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan
Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**

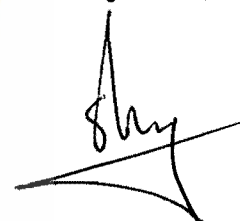


Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Leonora Bakarbesy".

Leonora Bakarbesy, S.H., M.H.
NIP. 131417056

Penyusun,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Sugeng Lestari".

Sugeng Lestari
NIM. 0300115264

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Dalam melaksanakan perkawinan di luar negeri kita perlu memperhatikan asas-asas hukum perdata internasional umum. Asas “Sahnya suatu perkawinan menurut Lex loci celebrationis akan menyebabkan sahnya perkawinan itu dimanapun juga” hanya berlaku untuk masalah-masalah yang menyangkut persoalan formalitas saja. Sedangkan syarat-syarat materiil (yang menyangkut status dan wewenang seseorang) tetap merujuk pada hukum positif Indonesia yakni Undang-undang No.1 Tahun 1974. Dalam hal perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri, perkawinan tersebut adalah sah. Pemerintah mengakui perkawinan beda agama di luar negeri. Hal ini terbukti dengan adanya Yurisprudensi Putusan MA No. 1400 K/Pdt/1986 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.477/2535/PUOD tanggal 25 Juli Yang menegaskan bahwa untuk mengisi kevakuman hukum maka pelaksanaan perkawinan dari warganegara Indonesia yang berbeda agama sebelum dicatatkan di Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil harus mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri yang isinya memerintahkan kepada Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk mencatatkan perkawinannya menurut hukum agama yang disepakati kedua mempelai.

- b. Pasal 56 ayat (2) menyebutkan :“Dalam waktu satu tahun setelah suami istri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di kantor pencatatan perkawinan tempat tinggal mereka”.Sesuai pasal 56 ayat (2), jika pasangan suami istri tersebut kembali di Indonesia maka selama dalam waktu satu tahun perkawinan tersebut harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan dengan membawa surat bukti perkawinan mereka yang telah dilaksanakan di luar negeri.Maka dalam hal ini pegawai Kantor Catatan Sipil harus menerima dan mencatat jika ada pasangan suami istri yng mendaftarkan perkawinannya

2.Saran

1. Sehubungan dengan tidak diaturnya masalah perkawinan beda agama dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,maka seharusnya Pemerintah membuat perUndang-undangan yang baru yang mana mengatur masalah perkawinan beda agama,sehingga dalam hal ini tercipta kepastian hukum dalam masyarakat.
2. Sulitnya prosedur menikah di Indonesia terutama pasangan yang berbeda agama membut mereka memilih melangsungkan perkawinannya di luar negeri.Untuk itu Pemerintah perlu melaksanakan tindakan-tindakan yang konkret untuk mempermudah prosedur dan tata cara pelaksanaan perkawinan di Indonesia.